

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep dan Teori Efisiensi (X_1)

Menurut Mahsun (2016:182) “Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk relatif”. Unit A adalah lebih efisiensi dibanding unit B, unit A adalah lebih efisiensi tahun ini dibanding tahun lalu, dan seterusnya.

Menurut Mardiasmo (2016:1) Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai output tertentu

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2016:161) Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disintesis menurut mahsun (2016:182) “Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk relatif”. Unit A adalah lebih efisiensi dibanding unit B, unit A adalah lebih efisiensi tahun ini dibanding tahun lalu, dan seterusnya. dapat dirumuskan yaitu (Mahmudi, 2016:171):

$$\text{Efisiensi PBB -P2} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB - P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}} \times 100\%$$

2.1.2 Konsep dan Teori Efektivitas (X_2)

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Menurut Mahsun (2016:182) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disintesakan menurut Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. dapat dirumuskan yaitu (Pekei, 2016:76):

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Target Penerimaan PBB - P2}} \times 100\%$$

2.1.3 Konsep dan Teori Kontribusi (X₃)

Menurut Halim (2016:94), kontribusi adalah sesuatu yang diberikan sebagai bentuk sumbangan Terhadap pendapatan asli daerah.

Menurut Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia (2017:10) Kontribusi dapat di artikan sebagai sumbangan yang diberikan dari PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan PBB P2 dan potensi penerimaannya semakin tinggi maka kontribusi terhadap pendapatan asli daerah akan meningkat.

Menurut Beni (2016: 136) kontribusi adalah untuk mengukur kemampuan daerah perlu ada kontribusi pendapatan asli daerah, dan apabila dalam tahun berjalan besar PAD menentukan untuk APBD pada tahun berikutnya, inilah kemampuan daerah yang sesungguhnya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disintesakan menurut Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia (2017:10) Kontribusi dapat di artikan sebagai sumbangan yang diberikan dari PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan PBB P2 dan potensi penerimaannya semakin tinggi maka kontribusi terhadap pendapatan asli daerah akan meningkat. dapat dirumuskan yaitu (Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia 2017:10) :

$$\text{Kontribusi PBB - P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah/PAD}} \times 100\%$$

2.1.4 Konsep dan Teori Pertumbuhan Penerimaan Realisasi (X₄)

Menurut Widodo (2016 : 35), Mengemukakan bahwa : Pertumbuhan adalah proses kenaikan penerimaan pajak dalam jangka panjang.

Menurut Kasmir (2016:107) adalah sebagai berikut: “Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.”

Menurut Halim (2016:135), mengemukakan bahwa: Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan pajak daerah baik target maupun realisasinya maka pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi guna menetapkan kebijakan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disintesisakan menurut Menurut Halim (2016:135), mengemukakan bahwa: Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya dapat dirumuskan yaitu (Abdul Halim, dalam Polii 2016)

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

G_x = Laju pertumbuhan PBB-P2 pertahun

X_t = Realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun Sekarang

X(t-1) = Realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun sebelumnya

2.1.5 Konsep dan Teori Pertumbuhan Wajib Pajak (X₅)

Menurut Wahyu, Maslichah dan Junaidi (2019:32) pertumbuhan wajib pajak adalah nilai terhadap banyaknya wajib pajak yang terdaftar berstatus secara aktif, untuk kewajiban perpajakannya di setiap tahunnya.

Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa Wajib Pajak

adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Menurut Thomas Sumarsan (2017:9) adalah: “Orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disintesis menurut Wahyu, Maslichah dan Junaidi (2019:32) pertumbuhan wajib pajak adalah nilai terhadap banyaknya wajib pajak yang terdaftar berstatus secara aktif, untuk kewajiban perpajakannya di setiap tahunnya. dapat dirumuskan yaitu (Pekei 2016:75)

$$\Delta X = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

ΔX = Rasio pertumbuhan wajib pajak

X_t = Jumlah wajib pajak setiap tahun rutin

$X_{(t-1)}$ = Jumlah wajib pajak pada tahun sebelumnya

2.1.6 Konsep dan Teori Pendapatan Asli Daerah (Y)

Menurut Baldric (2017:23) Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Carunia (2017:119) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya .

Menurut Sahya Anggaran (2016:326) adalah: “Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. Intensifikasi dilakukan pada sumber-sumber yang telah terbiasa ada di daerah dengan cara penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penerbitan objek-objek dan pengenaan sistem denda bagi penunggak. Ekstensifikasi dilakukan untuk menambah sumber-sumber baru yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disintesaikan menurut Sahya Anggaran (2016:326) adalah: “Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul Dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphbt) Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Metro Provinsi Lampung. SIMPLEX:Journal of Economic Management Vol 1 No 1 (2020): November 2020 I.Nyoman Gede Yasa	X ₁ : Efisiensi Penerimaan PBB X ₂ : Efektivitas Penerimaan PBB Y : Pendapatan Asli Daerah	X ₃ : Kontribusi Penerimaan PBB X ₄ : Pertumbuhan Penerimaan Realisasi PBB X ₅ : Pertumbuhan Wajib Pajak PBB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-PP) selama tahun 2013-2018 masuk pada kriteria sangat efisien dengan nilai efisiensi 5% -6%. 2. PBB-PP sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah selama kurun waktu 6 tahun (2013-2018) kurang dari 5%.
2.	Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 –2017 Dega Agung Pratama, Ratna Wijayanti Daniar Paramita, Muchamad Taufiq E-ISSN : 2622-304X, P-ISSN : 2622-3031 Progress Conference Volume 2, July 2019	X ₁ : Efisiensi Penerimaan PBB X ₂ : Efektivitas Penerimaan PBB Y : Pendapatan Asli Daerah	X ₃ : Kontribusi Penerimaan PBB X ₄ : Pertumbuhan Penerimaan Realisasi PBB X ₅ : Pertumbuhan Wajib Pajak PBB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mayoritas tingkat efektivitas tergolong sangat efektif, indikatornya adalah realisasi pemungutan pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan APBD dan rasio efektivitasnya mencapai lebih dari 100%. Namun ada 2 jenis pajak yang tingkat pemungutannya cukup efektif yaitu Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dan Pajak PBB-P2 masing-masing sebesar 89,6 % dan 89,8%. 2. Hasil analisis efisiensi pemungutan pajak daerah selama tahun 2013-2017 memiliki tingkat efisiensi yang berbeda-beda. Mayoritas tingkat efisiensi tergolong tidak efisien, indikatornya adalah biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk memungut pajak lebih tinggi dari pada penerimaan yang di dapat.
3.	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 1021-1032 2017 Marce Takasili Hebimisa , Jullie J. Sondakh , Anneke Wangkar	X ₂ : Efektivitas Penerimaan PBB X ₃ : Kontribusi Penerimaan PBB Y : Pendapatan Asli Daerah	X ₁ : Efisiensi Penerimaan PBB X ₄ : Pertumbuhan Penerimaan Realisasi PBB X ₅ : Pertumbuhan Wajib Pajak PBB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Tahun 2015-2016 belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun secara keseluruhan sudah efektif. 2. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro pada tahun 2014 sebesar Rp 20.681.159.632, pada tahun 2015 sebesar 20.818.151.553 dan pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah turun menjadi Rp 19.371.962.089.

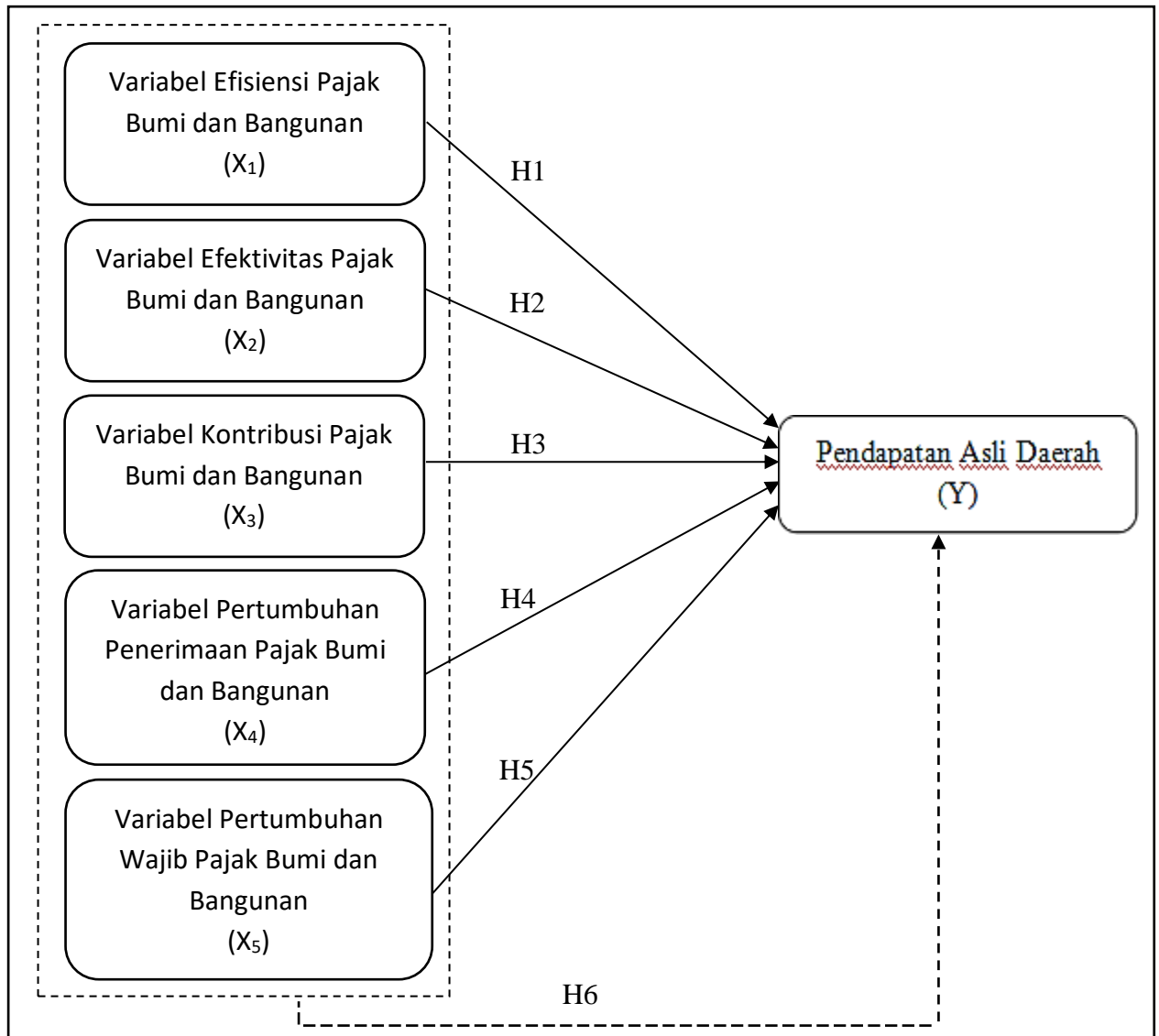
No	Judul Dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
4.	Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng) Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 7 No. 2, Agustus 2017 ISSN: 2599-2651 Kadek Yoga Ari Putra, Komang Sania Widiasari Yumia, Dewa Ayu Prayoni, Komang Novita Sri Rahayu	X ₃ : Kontribusi Penerimaan PBB X ₂ : Efektivitas Penerimaan PBB Y : Pendapatan Asli Daerah	X ₁ : Efisiensi Penerimaan PBB X ₄ : Pertumbuhan Penerimaan Realisasi PBB X ₅ : Pertumbuhan Wajib Pajak PBB	<ol style="list-style-type: none"> Kontribusi PBB P2 sangat berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dimana dalam hal ini tergolong ke dalam kriteria sangat baik dengan besarnya rata-rata persentase yaitu 99,70% Simpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Buleleng dapat disimpulkan bahwa di daerah Kabupaten Buleleng empat tahun terakhir ini bisa dikatakan tidak efektif. Target efektif pada tahun 2015 sampai bulan november 2018 target efektifitas belum tercapai.
5.	Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan Forum Ekonomi; Volume 18 No 1 2016 Wigi Astuti, Yudea	X ₄ : Laju Pertumbuhan Penerimaan PBB X ₃ : Kontribusi Penerimaan PBB Y : Pendapatan Asli Daerah	X ₁ : Efisiensi Penerimaan PBB X ₂ : Efektivitas Penerimaan PBB X ₅ : Pertumbuhan Penerimaan Realisas PBB	<ol style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan yang sangat baik. hal ini terjadi karena realisasi pada tahun 2013 lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2012, tetapi pada tahun 2014 laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sangat meningkat yaitu menjadi 30,12 %. Jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Balikpapan memberikan kontribusi yang masih kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan daerah yang diterima.
6.	Kontribusi Dan Laju Pertumbuhan Pbb-P2 Dan bphtb Terhadap Pad Kota Kediri Karena Perubahan Uu No 28 Tahun 2009 Zulistiani, Gesty Ernestivita, Ema Nurzainul Hakimah Jurnal Nusamba Vol.3 No.2 Oktober 2018	X ₄ : Laju Pertumbuhan Penerimaan PBB X ₃ : Kontribusi Penerimaan PBB Y : Pendapatan Asli Daerah	X ₁ : Efisiensi Penerimaan PBB X ₄ : Pertumbuhan Penerimaan Realisasi PBB X ₅ : Pertumbuhan Wajib Pajak PBB	<ol style="list-style-type: none"> Rata-rata Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD sejak mulai terealisasi menjadi sumber pendapatan pajak daerah mulai pada tahun 2013 sampai tahun 2017 yaitu 11,46%. Nilai 11,4% termasuk dalam rata-rata kriteria kurang. Sedangkan laju pertumbuhannya mempunyai rata-rata sebesar 1,58% termasuk dalam kriteria —Tidak Berhasil. Hasil dari perhitungan rata-rata kontribusi dan laju pertumbuhan PBB-P2 maupun BPHTB masih dikatakankurang walaupun keduanya sudah resmi menjadi sumber pendapatan asli daerah.

No	Judul Dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
7.	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pbb-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan. e-ISSN 24429449 Vol.7. No.2 (2019) 45-58 p-ISSN 2337-4721 Nur Anisa, Elva Nuraina, Liana Vivin Wihartanti	X ₁ : Efisiensi Penerimaan PBB X ₂ : Efektivitas Penerimaan PBB X ₃ : Kontribusi Penerimaan PBB X ₄ : Pertumbuhan Penerimaan PBB Y : Pendapatan Asli Daerah	X ₅ :Pertumbuhan Wajib Pajak PBB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan dari PBB-P2 di kabupaten Magetan pada tahun 2014-2018 kriterianya sangat efektif, hal ini dikarenakan penerimaan PBB-P2 selalu melampaui target yang ditentukan. 2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disarankan jika BPPKAD Kabupaten Magetan dapat mempertahankan serta mencapai target penerimaan PBB-P2 yang telah ditargetkan di tahun-tahun selanjutnya.

Dari pemaparan singkat penelitian sebelumnya terlihat bahwa rata-rata meneliti tingkat Efisiensi, efektivitas, kontribusi, Pertumbuhan Penerimaan Realisasi dan Pertumbuhan Wajib Pajak PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan mengetahui tingkat efisiensi dari pemungutan PBB di Kota Palembang ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan evaluasi untuk Pemerintah Daerah dalam proses pemungutan PBB dilihat dari berbagai faktor.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari latar belakang, tinjauan pustaka dan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka penulis menguraikan bentuk kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Variabel Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan, Variabel Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan,

Variabel Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan, Variabel Pertumbuhan Penerimaan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Variabel Pertumbuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial maupun simultan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Pada Kota Palembang.

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Diduga ada pengaruh secara positif dan signifikan antara Variabel Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kecamatan di Kota Palembang.
- H₂ : Diduga ada pengaruh secara positif dan signifikan antara Variabel Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kecamatan di Kota Palembang.
- H₃ : Diduga ada pengaruh secara positif dan signifikan antara Variabel Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kecamatan di Kota Palembang.
- H₄ : Diduga ada pengaruh secara positif dan signifikan antara Variabel Pertumbuhan Penerimaan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kecamatan di Kota Palembang.
- H₅ : Diduga ada pengaruh secara positif dan signifikan antara Variabel Pertumbuhan Wajib Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kecamatan di Kota Palembang.
- H₆ : Diduga ada pengaruh secara positif dan signifikan antara Variabel Efisiensi, Efektivitas, Kontribusi, Pertumbuhan Penerimaan Realisasi, dan

Pertumbuhan Wajib Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kecamatan di Kota Palembang.